LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN REJOSO

Jalan Bojonegoro No. 1 Rejoso Kode Pos 64453
Telp/Fax. (0358) 611261 email : kecamatanrejoso2025@nganjukkab.go.id
www.rejoso.nganjukkab.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan suatu bentuk akuntabilitas/pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Rejoso yang didukung dengan penggunaan anggaran. Di samping itu juga bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Rejoso, 20 April 2026
CAMAT REJOSO

TEGUH OVI ANDRIYANTO, SIP
Pembina Tingkat I
NIP. 19730906 199303 1 006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....

KATA PENGANTAR .....

DAFTAR ISI .....

BAB I PENDAHULUAN .....

1.1 Gambaran Umum/Latar Belakang .....

1.2 Landasan Hukum .....

1.3 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi .....

1.4 Isu-Isu Strategis yang sedang dihadapi organisasi .....

1.5 Sistematika Penulisan .....

BAB II PERENCANAAN KINERJA .....

2.1 Ikhtisar/Ringkasan Renstra/Renja .....

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....

A Capaian Kinerja Organisasi .....

B Realisasi Anggaran .....

BAB IV PENUTUP .....

4.1 Kesimpulan .....

LAMPIRAN- LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM / LATAR BELAKANG

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan (*face to face*) dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan.

Kecamatan sebagai *line office* dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik yang prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan **pemanfaatan potensi wilayah**, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah.

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rejoso Tahun 2025 ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengacu kepada Review Rencana Strategis Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja sebagai bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rejoso ini adalah:

a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk;

b. Sebagai wujud laporan pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
c. Sebagai bahan evaluasi instansi pemerintah dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025–2029;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024–2026.
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024–2026.
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perubahannya;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025–2029;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
18. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025. (Sesuaikan Nomor masing-masing, Jika ada perubahannya, setelah “2025” ditambahkan “dan perubahannya”)

1.3 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

1.3.1 Struktur Organisasi Kecamatan Rejoso

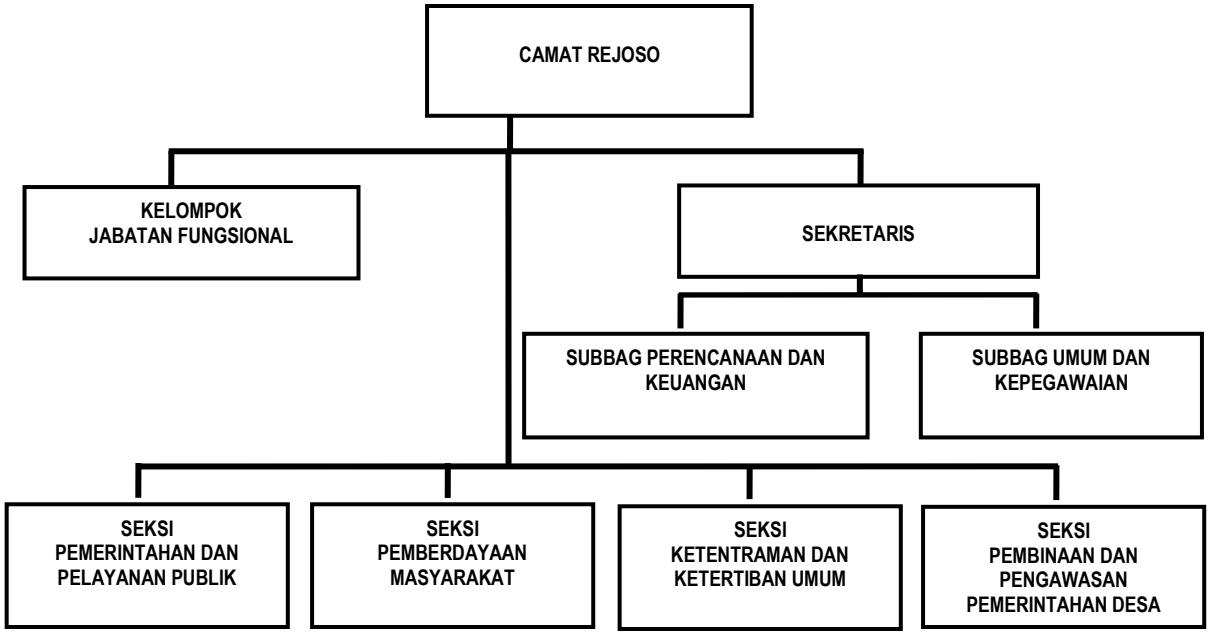
Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk sesuai dengan ketentuan Pasal I angka 3 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Rejoso ditetapkan sebagai Perangkat Daerah dengan type A.

Kecamatan dibentuk untuk meningkatkan **Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan**, **Pelayanan Publik** dan **Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah *jo* Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, selain itu Kecamatan juga melaksanakan tugas **Pembinaan dan Pengawasan Desa** sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 154 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Camat juga diamanatkan mendapat **Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati atas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Dengan demikian penjabaran Bagan Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN REJOSO



1.3.2 TUGAS DAN FUNGSI

TUGAS POKOK

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

FUNGSI

Camat menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. pengoordinasian penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
g. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
h. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Bupati; dan
i. pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
b. pengelolaan urusan keuangan;
c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
d. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

a) melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
b) melaksanakan pengelolaan keuangan;
c) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a) mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
b) mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c) mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
d) melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
e) melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
f) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2 Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas :

a) melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
b) melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
c) melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
d) melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;

e) melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
f) melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
g) melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h) melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
i) melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
j) melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a) melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
b) melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
c) melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
d) melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
e) melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
f) melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4 Seksi Ketenteraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketenteraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

a) melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
b) melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
c) melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
d) melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
e) melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
f) melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
g) melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
h) melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
i) melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
j) melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;
k) melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas :

a) melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;

b) melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

c) melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;

d) melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

e) melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;

f) melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;

g) melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa;

h) melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

i) melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;

j) melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;

k) melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;

l) melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;

m) melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;

n) melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan

o) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.



1.3.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia Kecamatan Rejoso Berdasarkan Jabatan Struktural

Tabel 1

Pegawai Kecamatan Rejoso

Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

No.	Nama	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Camat	1	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	1	1
3.	Kepala Seksi	2	1	3
4.	Kasubbag	-	-	0
5.	Staf/PNS	8	2	10
6.	PPPK	1		1
	JUMLAH			**16**

b. Sumber Daya Manusia Kecamatan Rejoso Berdasarkan Pangkat dan golongan

Tabel 2

Pegawai Pada Kecamatan Rejoso

Berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang Tahun 2023

	Pangkat	Golongan Ruang	Jml. Pegawai
1	Pembina Tk I	IV/b	1
2	Pembina	IV/a	1
3	Penata Tk I	III/d	3
4	Penata	III/c	0
5	Penata Muda Tk. I	III/b	1
6	Penata Muda	III/a	6
7	Pengatur Tk.1	II/d	3

8	Pengatur	II/c	0
9	Pengatur Muda Tk. 1	II/b	0
10	Pengatur Muda	II/a	0
11	PPPK Golongan V		1
	Jumlah		**16**

c. Sumber Daya Manusia Kecamatan Rejoso Berdasarkan Pangkat dan golongan

Tabel 3

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Rejoso

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2023

No	Pendidikan	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S2	1	1	2
2.	S1	5	2	7
3.	DIV	-	-	0
4	D3	-	-	0
5	SMA	6	1	7
6	SMP	-	-	0
	JUMLAH			**16**

1.3. ISU-ISU ASPEK STRATEGIS YANG DIHADAPI ORGANISASI

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Rejoso telah dijelaskan mengenai gambaran pelayanan Perangkat Daerah, untuk selanjutnya dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut sebagaimana tercantum dalam dokumen RPD 2024-2026 :

1. *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.* Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;

2. *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.* Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3. *Pelayanan Prima.* Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus

dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;

4. *Peningkatan Sinergitas Kecamatan*

Peningkatan Sinergitas Kecamatan mendorong kesinambungan organisasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar pemerintahan di wilayah Kecamatan Rejoso guna mempercepat pelaksanaan pembangunan serta mengembangkan berbagai kreatifitasdan inovasi dalam penyelenggaraan program pembangunan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan yang baik serta peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adapun strategi atau teknik untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh pimpinan Kecamatan Rejoso dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di kecamatan dan di desa/kelurahan antara lain:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib
3. Melakukan pembinaan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang berkelanjutan



1.5.SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Bab I Pendahuluan

1.1 Gambaran umum/latar belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

1.4 Isu-isu Strategis yang sedang dihadapi Organisasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab II Perencanaan Kinerja

2.1 Ikhtisar/Ringkasan Renstra/Renja

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

b. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

a. Kesimpulan

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

1.1 Ikhtisar/Ringkasan Renstra

Dalam Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kecamatan dibentuk untuk meningkatkan **Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan**, **Pelayanan Publik** dan **Pemberdayaan Masyarakat** selain itu juga melakukan tugas **Pembinaan dan Pengawasan Desa** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan dijabarkan lebih lanjut Tugas Camat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

1. Adapun tujuan Kecamatan Rejoso sesuai RPD 2024-2026 adalah ***Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan***, yang diukur dengan indikator kinerja yaitu berupa ***indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan***.

   Sedangkan sasaran Kecamatan Rejoso adalah :

   a. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
      Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
   a. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan.
      Indikator : Persentase Penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan

2. Sedangkan Visi Misi Kabupaten Nganjuk sesuai RPJMD 2025-2029 adalah

   Visi

   Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat

   Misi

   a. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban
   b. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan
   c. Meningkatnya kualitas, pelayanan, mutu pendidikandan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas

3. Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Nganjuk

Tujuan

a. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan toleran
b. Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik
c. Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan

Sasaran

a. Meningkatnya kerukunan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat
b. Meningkatnya kualitas layanan publik
c. Meningkatnya kemandirian desa

4. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Rejoso

Tujuan

Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan

Sasaran

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan
b. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan
c. Meningkatnya tertib administrasi desa

1.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kecamatan Rejoso Tahun 2025 disusun berdasarkan RPD tahun 2024-2026 dan RPJMD tahun 2025-2029 yang terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis sebagai berikut:

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Kecamatan Rejoso

Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 (Renstra 2024-2026)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	78 indeks
2.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	92 indeks
3.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	85 %

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.308.679.006	APBD 2025
2.	Program Penyelenggara Pemerintah dan Pelayanan Publik	Rp. 119.132.400	APBD 2025
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 188.063.600	APBD 2025
4	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	Rp. 82.450.000	APBD 2025
5	Program Penyelenggara Urusan Pemerintah Umum	Rp. 140.415.200	APBD 2025
6	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	Rp. 207.197.600	APBD 2025
	Jumlah	**Rp. 4.045.937.806**	APBD 2025

Untuk mencapai / mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 4.045.937.806,- ***(empat milyar empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam rupiah)*** yang selangkapnya sebagaimana Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 pada Renstra 2024-2026..

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Kecamatan Rejoso

Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 (Renstra 2025-2029)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik	91,54
2.	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	18,8 %
3.	Meningkatnya tertib administrasi desa	Prosentase desa tertib administrasi	90 %

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.996.834.471	APBD 2025
2.	Program Penyelenggara Pemerintah dan Pelayanan Publik	Rp. 81.978.900	APBD 2025
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.195.087.300	APBD 2025
4	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	Rp. 58.630.000	APBD 2025
5	Program Penyelenggara Urusan Pemerintah Umum	Rp. 180.213.900	APBD 2025
6	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	Rp. 96.798.200	APBD 2025
	Jumlah	**Rp. 3.809.542.771**	APBD 2025

Kecamatan Rejoso melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 3.809.542.771,- (*tiga milyar delapan ratus sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah*)** sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Rejoso Tahun 2025.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Rejoso merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Rejoso untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Rejoso Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Kecamatan Rejoso Tahun 2025 :

Pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, dipergunakan kriteria SMART sebagai akronim dari specific (spesifik), measurable (terukur), achievable (dapat dicapai), relevant (relevan), dan timebound (memiliki batas waktu).

Untuk mengukur capaian indikator kinerja Kecamatan Rejoso Tahun 2025, rumus yang dipergunakan adalah :

$$Capaian\ IKU = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\ \%$$

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kecamatan Rejoso menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori, dengan pengukuran kinerja difokuskan pada aspek capaian kinerja sasaran strategis dan kegiatan sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	≥ 91 %	Tercapai
II	80 % ≤ 90 %	Tercapai dengan catatan
III	< 80 %	Tidak tercapai

Capaian kinerja Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.

Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Sedangkan pengukuran kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Organisasi

A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berkenan (2025)

TABEL 3.1.1
Realisasi Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian (%)
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	*Renstra 2024-2026*	78 indeks	71,02	91,05 %
2.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	*Renstra 2024-2026*	92 indeks	90,58	98,45 %
3.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	*Renstra 2024-2026*	85 %	66,6 %	78,35 %
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (Indeks)	*Renstra 2025-2029*	91,54	90,57	98,94 %
5	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	*Renstra 2025-2029*	18,8 %	66,6 %	354 %
6	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	*Renstra 2025-2029*	90 %	87,5 %	97 %

Berdasarkan data pada Tabel 3.1.1 Realisasi Kinerja Tahun 2025, berikut adalah analisis mendalam mengenai capaian kinerja organisasi tersebut. Analisis ini membagi evaluasi menjadi 2 (dua) perspektif perencanaan,

yaitu berdasarkan RPD 2024-2026

1. Indikator : Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
   - Target : 78 indeks
   - Realisasi : 71,02
   - Persentase Capaian : 91,05 %
   - Analisa :
     - ❖ Kinerja sangat Berhasil : Capaian 91,05 %, menunjukkan bahwa target kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan telah mencapai target yang ditetapkan
     - ❖ Perbaikan sarana prasarana, dan penyederhanaan birokrasi sudah optimal



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Nganjuk, Jawa Timur 64412
Telepon (0358) 323388 Fax (0358) 321111
www.nganjukkab.go.id

Nganjuk, 28 November 2025

Nomor : 100/3888/411.000/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan (SKK) Tahun 2025

Kepada
Yth. Camat Se-Kab. Nganjuk
di
NGANJUK

Berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Administrasi dan Manajerial Pelaksanaan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Tahun 2025 pada tanggal 7 November 2025, maka bersama ini kami sampaikan hal sebagaimana berikut :

A. Dasar
1. Ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
2. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/313/KPTS/411.013/2023 tentang Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan, Sinergitas Kecamatan dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

B. Ruang Lingkup
1. Penilaian Administrasi berdasarkan upload data dalam Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) sampai dengan Hari Kamis Tanggal 6 November 2025.
2. Penilaian Indikator Manajerial dari Asisten Pemerintahan dan Kesra.

C. Hasil Penilaian
Hasil Penilaian Administrasi dan Indikator Manajerial sebagaimana berikut :

NO	KECAMATAN	NILAI	PERINGKAT
1.	Ngetos	90,80	I
2.	Ngluyu	87,08	II
3.	Wilangan	86,47	III
4.	Prambon	85,14	IV
5.	Baron	83,51	V
6.	Sawahan	82,23	VI
7.	Jatikalen	80,45	VII
8.	Nganjuk	80,39	VIII
9.	Berbek	80,28	IX



10.	Pelarangwo	79,78	X
11.	Bagor	79,70	XI
12.	Tanjunganom	78,44	XII
13.	Ngronggot	75,09	XIII
14.	Sukomoro	73,03	XIV
15.	Loceret	72,46	XV
16.	Kertosono	72,02	XVI
17.	Rejoso	71,02	XVII
18.	Gondang	68,09	XVIII
19.	Lengkong	65,40	XIX
20.	Pace	61,87	XX

D. Rekomendasi
1. Untuk meningkatkan pelayanan publik dan memenuhi data dukung kinerja yang berkualitas diharapkan kepada Saudara Camat supaya memerintahkan kepada Pejabat di Lingkungan masing masing agar:
   a. Setiap Pejabat atau yang ditugasi agar memahami tugas, pokok dan fungsi;
   b. Memetakan tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan;
   c. Tugas pokok dan fungsi yang belum dilaksanakan agar direncanakan langkah tindak lanjut; dan
   d. Hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat agar diput pada isian Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) dan dilengkapi data dukung.
2. Untuk pengisian Kinerja Kecamatan Tahun 2026 dapat dilakukan input data pada Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) mulai 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2026, diharapkan agar Pejabat atau yang ditugasi mulai saat ini setiap hasil kinerja harus diacan. Untuk pemenuhan Capaian Kinerja Renstra Kecamatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan disampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah
Kabupaten Nganjuk

Nur Solekan

Tembusan :
Bupati Nganjuk

2. Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
   - Target : 92 indeks
   - Realisasi : 90,58
   - Capaian : 98,45 %
   - Analisa :
     - ❖ Kinerja Berhasil : Capaian 98,45 %, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan PATEN telah tercapai mendekati target yang ditetapkan dalam

dokumen RPD / Renstra 2024-2026.

- Kualitas Pelayanan : Skor IKM 90,58 masuk dalam kategori Tercapai dengan catatan (skala 0-100 atau konversi ke 1-4). Ini mengindikasikan adanya efisiensi prosedur, kecepatan waktu, dan keramahan petugas yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
- Faktor Keberhasilan : karena adanya perbaikan sarana prasarana, penyederhanaan birokrasi, atau digitalisasi layanan tingkat kecamatan selama periode tersebut.

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Indikator sasaran mencapai angka 98,45 %, hal ini menunjukkan bahwa sistem yang berjalan sudah sangat stabil dengan target yang baik. Selisih angka riil (90,58 dari target 92) yang menandakan manajemen operasional di Kecamatan sudah berjalan sesuai riil. Berikut unsur penilaian E_sukma Jatim

1. Persyaratan
2. Sistem,Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya / Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksanaan
7. Perilaku Pelaksanaan
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
KECAMATAN REJOSO
TAHUN 2025
(Berdasarkan Renstra 2024-2026)

No.	JUMLAH RESPONDEN			Jumlah	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)			JUMLAH	IKM TAHUN 2025
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III		
1	2	3	4	6	7	8	9	11=(7+8+9)	12=11/3
1	100	186	258	544	89,3	89,8	92,66	271,76	90,58

3. Indikator : Persentase penurunan pelanggan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan
   - Target : 85 %
   - Realisasi : 66,6 %
   - Capaian : 78,35 %
   - Analisa :

     Target penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 85 % yang ditentukan dari Renstra Kecamatan Rejoso Tahun 2024-2026, dengan Realisasi Kinerja sebesar 66,6 % hasil ini diperoleh dari perbandingan laporan kejadian pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 Triwulan III dengan data laporan kejadian tahun 2024 di wilayah kecamatan rejoso sejumlah 9 kejadian, sedangkan pada tahun 2025 sejumlah 3 kejadian. Terdapat penurunan sejumlah 6 laporan kejadian

No	Mei		
	Tanggal	Kejadian	TKP
1	13/05/2025	Kebakaran Rumah	Desa Banjarejo Kc. Rejoso
No	Juli		
	Tanggal	Kejadian	TKP
1	27/07/2025	Kebakaran Rumah-Toko	Dsn Mungkung Kc. Rejoso
No	Agustus		
	Tanggal	Kejadian	TKP
1	14/08/2025	Kebakaran Rumah	Desa Ngadiboyo Kc. Rejoso

Analisi berdasarkan RPJMD 2025-2029

1. Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (Indeks)
   - Target : 91,54 indeks
   - Realisasi : 90,57
   - Persentase Capaian : 98,94 %
   - Analisa:
     - ❖ Kinerja Baik : Capaian 98,94 % menunjukkan komitmen yang sangat kuat dan berkelanjutan dalam meningkatkan pelayanan publik di kecamatan.
     - ❖ Tren Peningkatan: Nilai IKM 90,57 setara dari capaian periode
     - ❖ sebelumnya (90,58), menunjukkan komitmen dalam mempertahankan

kualitas yang berkelanjutan (*continuous improvement*).

- ❖ Kategori Kinerja : Nilai ini menunjukkan pelayanan sudah mendekati prima, di mana harapan masyarakat sudah hampir terpenuhi.

HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
KECAMATAN REJOSO
TAHUN 2025
(Berdasarkan Renstra 2025-2029)

No.	JUMLAH RESPONDEN				Jumlah	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)				JUMLAH	IKM TAHUN 2025
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7+8+9)	12=11/4
1	100	186	258	366	910	89,3	89,8	92,66	90,54	362,3	90,57

2. Indikator : Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
   - Target : 18,8 %
   - Realisasi : 66,6%
   - Capaian : 354 %
   - (Angka ini sangat tinggi / tidak wajar jika dalam persentase, kemungkinan besar data menunjukkan capaian 354 % adalah karena adanya kesalahan pada awal perencanaan)
   - Analisa:
     - ❖ Target penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 18,8 % yang ditentukan dari RPJMD Tahun 2025-2029, dengan Realisasi Kinerja sebesar 66,6 % hasil ini diperoleh dari perbandingan laporan kejadian pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 dengan data laporan kejadian tahun 2024 di wilayah kecamatan rejoso sejumlah 9 kejadian, sedangkan pada tahun 2025 sejumlah 3 kejadian. Terdapat penurunan sejumlah 6 laporan kejadian
     - ❖ Keberhasilan realisasi 66,6 % benar, artinya kinerja sangat sukses melampaui target. Pelanggaran menurun drastis dibandingkan target (18,8%).
     - ❖ Catatan: Capaian di atas 100% (354%) menunjukkan kemungkinan target terlalu rendah (*underestimated*) atau realisasi yang sangat luar biasa. (Dikarenakan ada kesalahan pada awal diperencanaan)

- ❖ Faktor Pendorong: Kemungkinan adanya perbaikan sistem koordinasi penegakan Perda, peningkatan patroli bersama Polsek/Koramil, atau partisipasi aktif masyarakat dalam pengamanan swakarsa (Siskamling) yang tidak terprediksi sebelumnya.

3. Indikator : Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)

- Target : 90 %
- Realisasi : 87,5 %
- Persentase Capaian : 97 %
- Analisa :

  Renstra Kecamatan Rejoso Tahun 2025-2029 menetapkan target pada sasaran: *"Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa"*. Salah satu indikator utama untuk mengukur sasaran ini adalah Persentase Desa dengan Administrasi Tertib.di Tri Bulan IV pada Tahun 2025.

  Berdasarkan data operasional tahun 2025, realisasi capaian kinerja tertib administrasi desa mencapai 87,5 %. Angka ini diperoleh dari 21 desa yang telah memenuhi kriteria administrasi tertib (meliputi penatausahaan keuangan, dokumen perencanaan desa, dan pelaporan) dari total 24 desa yang ada di wilayah Kecamatan Rejoso.

  - Dengan target 90%, realisasi 87,5 % menunjukkan capaian kinerja 97 % yag artinya tealh masuk dalam kategori tercapai, hal yang mendorong tercapainya kinerja adalah:
    1. Monitoring Rutin Monev : Kecamatan intensif melaksanakan evaluasi triwulanan terhadap dokumen administrasi desa.
    2. Pendampingan Intensif : Melakukan pendampingan langsung oleh Kasi Pemerintahan ke desa-desa yang memiliki kendala dalam penatausahaan.
    3. Digitalisasi : Mulai diterapkannya sistem pelaporan berbasis digital di 70% desa.

NO	PETUGAS DAN JENIS BUKU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
I.	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	
	Administrasi Umum (A)	
	1	Buku Peraturan Di Desa (A1)
	2	Buku Keputusan Kepala Desa (A2)
	3	Buku Inventaris dan Kekayaan Desa (A3)

	4	Buku Aparat Pemerintah Desa (A4)
	5	Buku Tanah Kas Desa (A5)
	6	Buku Tanah di Desa (A6)
	7	Buku Agenda (A7)
	8	Buku Ekspedisi (A8)
	9	Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa (A9)
	Administrasi Umum (B)	
	1	Buku Induk Penduduk (B1)
	2	Buku Mutasi Penduduk Desa (B2)
	3	Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk (B3)
	4	Buku Penduduk Sementara (B4)
	5	Buku Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Buku Kartu Keluarga (KK) (B5)
	Administrasi Keuangan (C)	
	1	Buku APBDes (C1)
	2	Buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) (C2)
	3	Buku Kas Pembantu Kegiatan (C3)
	4	Buku Kas Umum (C4)
	5	Buku Kas Pembantu (C5)
	6	Buku Bank Desa (C6)
	Administrasi Pembangunan (D)	
	1	Buku Rencana Kerja Pembangunan (D1)
	2	Buku Kegiatan Pembangunan (D2)
	3	Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan (D3)
	4	Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat (D4)
II	**ADMINISTRASI LAINNYA**	
	1	Buku BPD
	2	Buku Musyawarah Desa
	3	Buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/Adat
		Presentasi Desa Tertib Administrasi
		(Baik)

Dinilai tertib apabila ≥ 80 % buku administrasi desa telah terisi

Dari hasil monitoring desa yang tertib administrasi 24 Desa yang tertib dari 24 Desa

DATA DESA TERTIB ADMINITRASI
KECAMATAN REJOSO

NO.	D E S A	PROSENTASE	KET.
1.	DESA BANJAREJO	92,5 %	Tertib Administrasi
2.	DESA JATIREJO	100 %	Tertib Administrasi
3.	DESA JINTEL	80 %	Tertib Administrasi
4.	DESA KEDUNGPADANG	80 %	Tertib Administrasi
5.	DESA KLAGEN	92,5 %	Tertib Administrasi
6.	DESA MLORAH	96,2 %	Tertib Administrasi
7.	DESA MUNGKUNG	85 %	Tertib Administrasi
8.	DESA MUSIR LOR	70,3 %	Tidak Tertib
9.	DESA NGANGKATAN	74 %	Tidak Tertib
10.	DESA PUHKEREP	85 %	Tertib Administrasi
11.	DESA SAMBIKEREP	80 %	Tertib Administrasi
12.	DESA SETREN	96,2 %	Tertib Administrasi
13.	DESA SUKOREJO	100 %	Tertib Administrasi
14.	DESA TALANG	77,7 %	Tidak Tertib
15.	DESA WENGKAL	100 %	Tertib Administrasi
16.	DESA MOJOREMBUN	100 %	Tertib Administrasi
17.	DESA REJOSO	100 %	Tertib Administrasi
18.	DESA TALUN	100 %	Tertib Administrasi
19.	DESA SIDOKARE	96,2 %	Tertib Administrasi
20.	DESA NGADIBOYO	100 %	Tertib Administrasi
21.	DESA MUSIR KIDUL	85 %	Tertib Administrasi

22.	DESA GEMPOL	85 %	Tertib Administrasi
23.	DESA TRITIK	85 %	Tertib Administrasi
24	DESA BENDOASRI	100 %	Tertib Administrasi

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.1.2

Perbandingan Realisasi Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

NO	Tujuan /Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Renstra 2024-2026	-	-	77	78			50,5	71,02
2	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	-	-	89	90	86	-	91,54	90,58
3	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	-	-	80	85	-	-	81,8	66,6
4	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik	Renstra 2025-2029	-	-	89	91,54	-	-	91,54	90,57

5	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Renstra 2025-2029	-	-	80	18,8	-	-	81,8	66,6
6	Meningkatnya tertib administrasi desa	Prosentase desa tertib administrasi	Renstra 2025-2029	-	-	-	90	-	-	-	87,5

**sesuai tabel 3.1.2 LKJIP tahun 2024*

Dari Tabel 3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 diatas dapat kami sampaikan Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Rejoso dengan Realisasi Kinerja Kecamatan Rejoso pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tercantum dalam RPD 2024-2026 dan RPJMD 2025-2029 pada masing-masing Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. **Analisis Capaian Berdasarkan RPD 2024-2026**

   Perbandingan antara realisasi kinerja tahun anggaran dengan target akhir Renstra penting untuk mengevaluasi sejauh mana langkah-langkah strategis yang telah diambil dan berhasil dalam mencapainya. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan jangka panjang berikutnya dan untuk membuat penyesuaian yang diperlukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

   Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran satu adalah sebagai berikut :

   a. **Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan**

      Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada periode 2022 hingga 2025 pada indikator Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dapat dilihat dan diukur pada tahun 2024 dan tahun 2025 sesuai dokumen RPD 2024-2025 dengan target tahun 2024 adalah 77 indeks naik menjadi 78 indeks pada tahun 2025 dengan realisasi 50,50 di tahun 2025 Tribulan III dan naik menjadi 71,02 di tahun 2025 Tribulan IV

   b. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)**

      Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada periode tahun 2022 hingga 2025, sasaran untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) menunjukkan tren penurunan realisasi. Hal ini diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang

mencerminkan persepsi publik terhadap efektivitas, kecepatan, dan transparansi layanan di tingkat Kecamatan.

Analisis Capaian Tahunan: Pada tahun 2024 dan 2025, realisasi IKM menunjukkan penurunan dari angka 91,54 di tahun 2024 ke angka 90,58 di tahun 2025. Meskipun ada penurunan kinerja namun kecamatan rejoso tetap berupaya maksimal dalam optimalisasi standar pelayanan minimal.

c. Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.

Pada tahun 2022 dan 2023 tidak menampilkan indikator sasaran Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan. Terkait sasaran Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum, instansi menunjukkan komitmen kuat dalam menekan angka pelanggaran di wilayah Kecamatan. Pada tahun 2024, realisasi penurunan pelanggaran tercatat sebesar 81,8%. Dengan Kejadian Sbb:

Berikut upaya menjaga keamanan dan ketertiban Tahun lalu (2024):

1. Pengamanan Malam Takbiran/hari raya idul fitri tahun 2024;
2. Pengamanan Silaturahmi perguruan silat IPSI
3. Pengamanan penertiban banner tanpa ijin;
4. Pengamanan dan Penertiban pembuangan sampah;
5. Pengamanan Pileg dan Pilpres tahun 2024;
6. Pengamanan apel cipta kondisi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden;
7. Pengamanan apel gelar pasukan dalan rangkat pengamanan NATARU.

Persentase telah memenuhi dari target sebesar 80 %, dan angka ini menjadi fondasi penting dalam pemetaan wilayah rawan konflik 2024, dengan realisasi 81,8%. Secara administratif, realisasi ini bisa disebabkan oleh intensitas pengawasan yang meningkat sehingga lebih banyak pelanggaran yang terdeteksi dan tercatat.

Lonjakan Pada tahun 2025, target ditetapkan pada angka 85 % dengan realisasi sebesar 66,6 %. yang artinya kinerja di lapangan sudah optimal secara signifikan. Namun masih perlunya lebih intensif koordinasi antara aparat kecamatan dengan unsur pengamanan kewilayahan serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan.

2. Analisis Capaian Berdasarkan RENSTRA 2025-2029 (Baseline)

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada periode tahun 2022 hingga 2025, sasaran untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) menunjukkan tren penurunan realisasi. Hal ini diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencerminkan persepsi publik terhadap efektivitas, kecepatan, dan transparansi layanan di tingkat Kecamatan.

Analisis Capaian Tahunan: Pada tahun 2024 dan 2025, realisasi IKM menunjukkan penurunan dari angka 91,54 di tahun 2024 ke angka 90,57 di tahun 2025. Meskipun ada penurunan kinerja namun kecamatan rejoso tetap berupaya maksimal dalam optimalisasi standar pelayanan minimal

- Renstra 2024-2026 : Fokus pada pemenuhan standar pelayanan dasar, penyederhanaan prosedur administratif, dan peningkatan kompetensi petugas PATEN. Realisasi kinerjanya sering kali menitikberatkan pada kecepatan penyelesaian dokumen dan transparansi biaya.
- Renstra 2025-2029 : Fokus bergeser pada digitalisasi total, integrasi indikator (online), dan proaktif dalam pelayanan. Arah kebijakan menekankan penggunaan teknologi informasi yang lebih masif untuk mempercepat layanan dan mempermudah akses masyarakat, serta integrasi data dengan instansi terkait.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PATEN

    a. Renstra 2024-2026 : Target IKM umumnya berada di kisaran “Baik” hingga “Sangat Baik” (skala 80-90). Realisasi kinerja pada periode ini seringkali menargetkan perbaikan pelayanan dari level menengah ke atas.
    b. Renstra 2025-2029 : Target IKM dinaikkan menjadi “Sangat Baik” secara konsisten, bahkan sering mematok nilai di atas 90. Penekanan realisasi bukan hanya pada kepuasan administratif, tetapi juga kepuasan atas kecepatan dan kemudahan (aspek waktu dan kenyamanan).

b. Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.

Pada tahun 2022 dan 2023 tidak menampilkan indikator sasaran Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan. Terkait sasaran Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum, instansi menunjukkan komitmen kuat dalam menekan angka pelanggaran di wilayah Kecamatan.

Realisasi Penurunan Pelanggaran pada Renstra 2025-2029 umumnya diharapkan lebih tinggi dalam menurunkan persentase pelanggaran Trantibum dibandingkan 2024-2026. Hal ini dikarenakan 2025-2029 merupakan jabaran langsung dari visi-misi kepala daerah baru yang menuntut peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui situasi wilayah yang lebih kondusif dan tertib.

Adapun perbandingan realisasi tahun 2024 dengan 2025 terdapat penurunan realisasi dari 81,8% turun menjadi 66,6% dari target 80% pada tahun 2024 dan 18,8% di tahun 2025

c. **Presentase Desa Tertib Administrasi Desa**

Salah satu sasaran strategis yang menjadi fokus pada tahun anggaran 2025 adalah "Meningkatnya Tertib Administrasi Desa". Sasaran ini diukur melalui indikator Persentase Desa Tertib Administrasi Desa. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, berikut adalah rincian capaiannya: Pada tahun 2025, yang merupakan tahun awal implementasi Renstra 2025-2029, target kinerja ditetapkan sebesar 90%. Adapun realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 87,5%. Jika dibandingkan antara realisasi terhadap target, maka persentase capaian kinerja mencapai 97%, yang masuk dalam kategori "Sangat Berhasil". Berdasarkan data, ringkasan evaluasi capaian kinerja untuk indikator Persentase Desa Tertib Administrasi Desa untuk tahun 2022 hingga 2024 berstatus N/A (dikarenakan indikator ini baru ditetapkan pada Renstra 2025-2029), analisis akan berfokus pada efektivitas pencapaian di tahun pertama periode perencanaan.

Meskipun target tahun 2025 telah tercapai secara maksimal (97%), kecamatan perlu menjaga konsistensi kualitas administrasi tersebut. Untuk tahun berikutnya, direkomendasikan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap parameter "Tertib Administrasi" agar tidak hanya

mencakup kelengkapan dokumen secara kuantitas, tetapi juga kualitas dan validitas data di tingkat desa

A.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada dokumen renstra.

Tabel 3.1.3.1

Target Kinerja Renstra
Berdasarkan Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target Renstra (Tahun)						
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Renstra 2024-2026	77	78	79	-	-	-	-
2	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	89	90	91	-	-	-	-
3	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	80 %	85 %	85 %	-	-	-	-
4	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik	Renstra 2025-2029	91,54	91,54	92	92,5	93	93,5	94
5	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Renstra 2025-2029	18,8	18,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6	Meningkatnya tertib administrasi desa	Prosentase desa tertib administrasi	Renstra 2025-2029	90	90	92	94	96	98	100

Tabel 3.1.3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir Renstra

NO	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target Akhir Renstra -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Kemajuan (%)
1	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Renstra 2024-2026	79	71,02	89,89 %
%2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)	Renstra 2024-2026	91	90,58	99,5 %
3	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Presentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	85 %	66,6 %	78,35 %
4	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik	Renstra 2025-2029	94	90,57	96,3%
5	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Renstra 2025-2029	0,2	66,6 %	333%
6	Meningkatnya tertib administrasi desa	Prosentase desa tertib administrasi	Renstra 2025-2029	100	87,5%	87,5%

1. Analisis Capaian Berdasarkan RPD 2024-2026

a. **Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan**

Berdasarkan data terbaru, terdapat penyesuaian pada Target Tahun Akhir Renstra 2024-2026 realisasi Indeks Sinergitas Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan pada akhir tahun 2025 sebesar 71,02 indeks. Dibandingkan dengan target akhir Renstra 2024-2026 sebesar 79 dengan tingkat kemajuan sebesar 89,89% yang diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Kinerja Tahun 2025}}{\text{Target pada akhir Renstra}} \times 100\ \% = \frac{71{,}02}{79} \times 100\ \% = 89{,}89\ \%$$

Dengan tingkat kemajuan Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 89,89 %, maka dapat dikatakan bahwa capaian ini menunjukkan diatas target yang ditentukan

b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Berdasarkan data terbaru disampaikan, terdapat penyesuaian pada Target Tahun Akhir Renstra menjadi 91. Dengan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada tahun 2025 tercatat sebesar 90,58. Capaian ini menunjukkan konsistensi instansi dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas. Selisih capaian tersebut akan menjadi bahan evaluasi strategis, terutama dalam mengidentifikasi unsur pelayanan mana yang masih memerlukan akselerasi guna mencapai angka ideal pada periode mendatang.

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada tahun 2025 sebesar 90,57. Dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 91 dengan tingkat kemajuan sebesar 99,5% yang diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Kinerja Tahun 2025}}{\text{Target pada akhir Renstra}} \times 100\ \% = \frac{90{,}58}{91} \times 100\ \% = 99{,}5\%$$

Tingkat kemajuan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 98 % , maka dapat dikatakan bahwa dalam hal peningkatan pelayanan publik di Kecamatan Rejoso telah dilaksanakan secara optimal. Hal ini dikarenakan Kecamatan Rejoso melakukan peningkatan pelayanan Ceria (Cepat,

Efesien dan Efektif, Ramah, Ikhlas, Akuntabel) sehingga respon baik dari masyarakat meningkat hal ini dibuktikan dengan hasil survey masyarakat melalui aplikasi E-Sukma dengan hasil baik. Kedepan Kecamatan Rejoso akan menaikkan target pelayanan publik sehingga diharapkan pelayanan di Kecamatan Rejoso semakin baik

c. Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan

Target akhir Renstra ditetapkan pada angka 85, sementara realisasi yang dicapai adalah 66,6. Angka ini menunjukkan bahwa upaya penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban sudah berjalan efektif dan mendekati target yang direncanakan.

Hasil ini menggambarkan keberhasilan langkah-langkah preventif dan penegakan peraturan di lapangan. Meskipun belum mencapai angka 100%, capaian ini merupakan indikator bahwa gangguan ketentraman dan ketertiban umum dapat diminimalisir secara berkelanjutan. Selisih capaian yang ada akan menjadi fokus perbaikan pada periode selanjutnya melalui penguatan deteksi dini dan perluasan kolaborasi dengan unsur pengamanan kewilayahan lainnya.

Realiasasi Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan pada tahun 2025 sebesar 66,6 % dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 85 % maka tingkat kemajuannya sebesar

$$\frac{\text{Realisasi Kinerja Tahun 2025}}{\text{Target pada akhir Renstra}} \times 100\ \% = \frac{66{,}6}{85} \times 100\ \% = 78{,}35\ \%$$

2. Analisis Capaian Berdasarkan RPJMD 2025-2029 (Baseline)

a. Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan

Berdasarkan data terbaru untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan, indikator ini menunjukkan pencapaian yang sangat presisi terhadap target *baseline* yang ditetapkan. Realisasi sebesar 90,58 terhadap target 94 menghasilkan tingkat kemajuan sebesar 96,3%. Karena data ini merupakan *baseline* (tahun awal) dari perencanaan jangka menengah yang baru, pencapaian 96,3% ini menjadi titik awal yang sangat aman. Instansi telah membuktikan kapasitasnya dalam menjaga kualitas layanan pada level tinggi, sehingga

fokus pada tahun-tahun berikutnya adalah mempertahankan konsistensi skor tersebut agar tidak mengalami penurunan (stagnasi). Sebagai tahun awal dalam implementasi Renstra 2025-2029, capaian ini menegaskan komitmen Kecamatan dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima dan responsif. Keberhasilan mencapai target *baseline* ini menjadi pondasi penting bagi penguatan kepercayaan publik dan efektivitas birokrasi di tingkat kecamatan untuk tahun-tahun mendatang. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan pada tahun 2025 sebesar 90,57. Dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2030 sebesar 94 dengan tingkat kemajuan sebesar 96,3% yang diperoleh dari formula sebagai berikut:

Realisasi Kinerja Tahun 2025 90,57
---------- x 100 % = -------- X 100 % = 96,3%
Target pada akhir Renstra 94

b. Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan

Realisasi sebesar 66,6% terhadap target 0,2% menghasilkan tingkat kemajuan sebesar 333%. Dalam sistem akuntabilitas kinerja, angka ini menunjukkan performa yang sangat progresif. Instansi berhasil menekan angka pelanggaran trantibum dua kali lipat lebih banyak daripada yang diproyeksikan dalam target *baseline* awal. Tingkat kemajuan 333% ini mengindikasikan bahwa strategi keamanan yang diterapkan di wilayah Kecamatan bekerja dengan sangat efektif. Hal ini biasanya didorong oleh:

- Peningkatan frekuensi patroli gabungan.
- Keberhasilan program deteksi dini gangguan ketertiban.
- Edukasi masyarakat yang berhasil menurunkan niat pelanggaran secara drastis

Realiasasi Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan pada tahun 2025 sebesar 66,6% maka tingkat kemajuannya sebesar

Realisasi Kinerja Tahun 2025 66,6
---------- x 100 % = -------- X 100 % = 333%
Target pada akhir Renstra 0,2

c. Presentase Desa Tertib Administrasi Desa

Berdasarkan data tersebut untuk sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Desa, indikator ini menunjukkan pencapaian yang sangat solid dan akurat pada tahun pertama implementasi Renstra 2025-2029. Adapun target kinerja pada akhir Renstra 2025-2029 ditetapkan sebesar 100% dengan realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 79% menunjukkan bahwa program pembinaan administrasi desa oleh Kecamatan belum berjalan sesuai dengan perencanaan. Sasaran ini diukur melalui indikator Persentase Desa Tertib Administrasi Desa yang meliputi kelengkapan sebagai berikut : Buku Administrasi Umum, Buku Administrasi Penduduk, Buku Administrasi Keuangan, Buku Administrasi Pembangunan, Buku Administrasi Lainnya. Sesuai dengan analisis di awal, pencapaian 79% ini menunjukan bahwa mayoritas desa sudah berada pada status tertib administrasi. Realiasasi Meningkatnya Tertib Administrasi Desa pada tahun 2025 sebesar 79 % maka tingkat kemajuannya sebesar

$$\frac{\text{Realisasi Kinerja Tahun 2025}}{\text{Target pada akhir Renstra}} \times 100\ \% = \frac{87{,}5}{100} \times 100\ \% = 87{,}5\ \%$$

A.4 Perbandingan Realisasi kinerja Tahun berkenaan (2025) dengan Standar Nasional (minimal dengan Regional/provinsi/kabupaten yang berbatasan)

Tabel 3.1.4.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standard Nasional (berdasarkan RPD 2024-2026)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Standart Jatim	Realisasi 2025	Posisi Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	67,47 (nilai rata rata sinergitas kab.nganjuk)	71,02	diatas standart
2.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	89.23 (*e-sukma .jatimprov. go.id)*	90,58	Rata rata standard
3.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	100 % (Kc. Sumbersari Jember)	66,6%	Masih jauh dibawah standart

Tabel 3.1.4.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standard Nasional (berdasarkan RPJMD 2025-2029)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Standart Jatim	Realisasi 2025	Posisi Kinerja
	1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	89.23	90,57	Diatas standart
2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	100 %	66,6 %	Dibawah
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Presentase Desa Tertib Administrasi Desa	100 % (Kc. Rogojampi)	87,5 %	dibwah

1. Analisis Capaian Berdasarkan RPD 2024-2026

a. Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Realisasi kinerja Tujuan strategis Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dari tahun 2025 sebesar 71,02 indeks jika dibandingkan dengan nilai rata Indeks Sinergitas kecamatan kabupaten nganjuk 67,47 posisi kinerja Kecamatan Rejoso sudah diatas target yang ditentukan

b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Realisasi kinerja IKM Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) tahun 2025 adalah 90,58 dibandingkan dengan IKM Provinsi Jawa Timur sebesar 89.23 Kecamatan Rejoso masih dalam batas rata rata standart Nasional/Provinsi. Maka dapat dikatakan kinerja dalam pelayanan publik sudah optimal. Kedepannya Kecamatan Rejoso akan menaikkan target IKM sehingga harapannya Standar Pelayanan di Kecamatan Rejoso mampu melebihi Standar Provinsi Jawa Timur.

c. Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan

Realisasi kinerja Sasaran strategis Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan dari tahun 2025 sebesar 66,6% jika dibandingkan dengan Standart Nasional/Provinsi 100 % (kec. Sumbersari, Jember) maka realisasi Kecamatan Rejoso masih dibawah standart Nasional/Propinsi

2. Analisis Capaian Berdasarkan RPJMD 2025-2029 (Baseline)

a. Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan

Dari table Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan RPJMD 2025-2029. Dengan Realisasi Tingkat Nasional/Provinsi dapat disimpulkan bahwa Realisasi kinerja sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan tahun 2025 adalah 90,57 dibandingkan dengan IKM Provinsi Jawa Timur sebesar 89.23 Kecamatan Rejoso sudah diatas standart Nasional/Provinsi. Maka dapat dikatakan kinerja dalam pelayanan publik sudah optimal.

b. Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan

Realisasi kinerja Sasaran strategis Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan dari tahun 2025 sebesar 66,6% dibandingkan dengan Standart Nasional/Provinsi yaitu 100 % maka realisasi Kecamatan Rejoso masih dibawah standart tersebut

c. Presentase Desa Tertib Administrasi Desa

Realisasi kinerja Sasaran strategis Meningkatnya Tertib Administrasi Desa dari tahun 2025 sebesar 87,5 % dibandingkan dengan Standart Nasional/Provinsi 100% (Kec. Rogojampi, Banyuwangi) sehingga realisasi kinerja Kecamatan Rejoso adalah masih dibawah standart



A.5 Analisis keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

3.1.4 Analisis Keberhasilan / Kegagalan Capaian Kinerja

Tabel 3.1.5

N0	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Faktor Pendukung atau Penghambat	Alternatif / Solusi
1.	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Renstra 2024-2026	78	71,02	91,05%	Faktor Pendukung keberhasilan : a. Komitmen Pimpinan : Adanya komitmen kuat dari Camat selaku kepala wilayah dalam rutin menyelenggarakan pertemuan rutin bulanan bersama Kepala Desa/Lurah dan lembaga kemasyarakatan. b. Digitalisasi Tata Kelola : Penerapan aplikasi e-planning / e-budgeting tingkat kabupaten yang sudah terintegrasi, memudahkan kecamatan memantau sinkronisasi kegiatan desa. c. Budaya Kerja : Adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musrenbang Kecamatan, di mana usulan desa lebih terarah sesuai dengan prioritas Renstra 2025-2029.	.

2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)	Renstra 2024-2026	92	90,58	98,45 %	➢ **Keberhasilan:** • Peningkatan Kecepatan Layanan : Berhasil mengurangi rata-rata waktu pemrosesan dokumen (misal: surat pindah, KK, surat keterangan usaha) berkat optimalisasi SOP dan alur layanan satu pintu. • Digitalisasi Layanan : Implementasi beberapa formulir online (PATEN Digital) berhasil menurunkan antrean fisik di kantor kecamatan. • Kompetensi Petugas : Petugas PATEN menunjukkan peningkatan keramahan dan kemampuan teknis berdasarkan pengamatan langsung dan hasil rekapitulasi saran. ➢ **Faktor Pendukung**: 1. Sarana Fisik : Adanya gedung pelayanan PATEN yang refresentatif, nyaman, dan terpusat. 2. Transparansi Prosedur: Pemasangan maklumat pelayanan, kejelasan biaya (atau penegasan layanan gratis), serta estimasi waktu penyelesaian yang dipampang dengan jelas.istem Pengaduan yang Responsif: Adanya kanal pengaduan (WhatsApp, media sosial, atau kotak saran) yang ditindaklanjuti secara cepat sehingga masyarakat merasa	

							suaranya didengar.SDM : Petugas PATEN yang responsif dan dilatih untuk memberikan pelayanan yang ramah dan sopan. 3. Inovasi : Penggunaan media sosial / WhatsApp untuk pengaduan dan informasi layanan (fast response).	
3.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Presentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	85 %	66,6 %	78,35 %	➢ **Faktor Penyebab** • Kolaborasi Lintas Sektor : Adanya koordinasi aktif dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam tim patroli terpadu (Sinergi 3 Pilar).belum optimal • Pendekatan Humanis : Penyelesaian potensi konflik melalui dialog (mediasi) di tingkat desa/kelurahan belum berhasil mengurangi eskalasi pelanggaran. • Partisipasi Warga : Kesadaran masyarakat melalui Forum Komunikasi Desa / Kelurahan dalam melaporkan potensi gangguan ketertiban (aktifnya Poskamling).belum maksimal	Pertahankan dan tingkatkan melalui inovasi pelayanan, guna mewujudkan kinerja yang lebih akuntabel, transparan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di tahun-tahun berikutnya.
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik	Renstra 2025-2029	91,54	90,57	98,94 %	• **Keberhasilan:** ➢ Inovasi Pelayanan : Adanya implementasi layanan berbasis digital (misal : pelayanan online mandiri/paten digital)	

							mempercepat waktu penyelesaian dokumen, yang memuaskan masyarakat. ➢ Kompetensi Petugas : Kompetensi dan perilaku pelaksana pelayanan (kesopanan dan keramahan) meningkat secara signifikan berkat pelatihan pelayanan prima (service excellence) di awal tahun. ➢ Sarana Prasarana : Peningkatan fasilitas ruang tunggu dan kenyamanan di area Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN). • **Faktor Pendukung:** ➢ Komitmen pimpinan (Camat) yang tinggi dalam memonitor hasil survei harian / mingguan. ➢ Alokasi anggaran yang memadai untuk perbaikan sarana prasarana PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan). ➢ Tersedianya SOP pelayanan yang jelas dan terpampang secara transparan.	
5	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan	Presentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Renstra 2025-2029	18,8 %	66,6 %	354 %	➢ Faktor Pendukung Keberhasilan Keberhasilan peningkatan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor : 1. Penguatan Sinergitas Muspika : Kolaborasi intensif antara Kecamatan Rejoso, Polsek Rejoso, dan Koramil Rejoso melalui patroli gabungan rutin.	.

							2. Pemberdayaan Linmas Desa : Peningkatan kapasitas dan partisipasi Satlinmas di tingkat desa/kelurahan dalam deteksi dini gangguan trantibum. 3. **Respon Cepat Pengaduan :** Pemanfaatan media sosial dan nomor pengaduan warga yang responsif dalam menangani laporan gangguan ketertiban. 4. **Dialog Partisipatif :** Pelaksanaan dialog dengan tokoh masyarakat dan pelaku usaha (PKL/pedagang) untuk kesepakatan tertib lingkungan.	
6	Meningkatkan Tertib Administrasi Desa di Kecamatan	Presentase Desa Tertib Administrasi Desa	Renstra 2025-2029	90 %	87,5 %	97 %	**Faktor Penyebab Keberhasilan :** 1. Pendampingan Intensif : Dilakukannya secara optimal intensifikasi fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan (binkumwas) administrasi desa oleh tim Kecamatan Rejoso secara rutin (triwulanan). 2. Digitalisasi Pemerintahan : Penggunaan aplikasi administrasi desa (misal : Siskeudes/Prodeskel) yang semakin mapan di tingkat desa, belum optimal mempercepat pelaporan. 3. Peningkatan Kapasitas SDM melalui pelatihan dan bimtek bagi perangkat desa yang terfokus pada tata naskah dinas dan pengelolaan aset desa .	.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.1.6
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (%)	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Renstra 2024-2026	64,74	18,9	45,84%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)	Renstra 2024-2026	98,45	30,73	67,72%
3.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Presentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	78,35	77,94	0,41 %
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik	Renstra 2025-2029	98,94	43,28	55,66 %
5.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan	Presentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Renstra 2025-2029	354	36,62	317,38%
6.	Meningkatkan Tertib Administrasi Desa di Kecamatan	Presentase Desa Tertib Administrasi Desa	Renstra 2025-2029	97	34,46	62,54%

1. Analisis Capaian Berdasarkan RPD 2024-2026

a. **Dari sasaran Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan** dengan capaian kinerja 64,74% dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 sebesar 18,9 % sehingga dapat diperoleh efisiensi dengan formula capaian dikurangi dengan realisasi : 64,7% – 18,9 % = 45,84%.

Hal ini menunjukkan komitmen di Kecamatan Rejoso dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun efesiensi ini disebabkan :

Dengan keterbatasan jumlah Pegawai Pemerintah Kecamatan Rejoso tetap melaksanakan pelayanan publik semaksimal mungkin sehingga masyarakat tetap mendapatkan pelayanan cukup baik dan senantiasa dievaluasi secara rutin dan berkala untuk perbaikan kedepannya;

Secara umum, pelaksanaan tujuan perangkat daerah dalam meningkatkan sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan menunjukkan kinerja yang efisien, dengan selisih efisiensi sebesar 33,3%, yang mencerminkan penggunaan anggaran yang hemat namun tetap mampu mencapai target kinerja secara semaksimal mungkin.

b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)

Dari Sasaran Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan capaian kinerja sebesar 98,45% dan realisasi anggaran dari empat Program yang mendukung yaitu :

a. Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
c. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Rata rata dari tiga program tersebut sebesar 30,73 % sehingga dapat diperoleh efisiensi dengan formula capaian kinerja dikurangi dengan realisasi anggaran = 98,45 % – 30,73 % = 67,72 %.

Penyebab: Adanya optimalisasi teknologi informasi (digitalisasi) dan tingginya partisipasi swadaya perangkat desa, sehingga ketergantungan pada belanja modal/operasional dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas output.

Hal ini menunjukkan komitmen di Kecamatan Rejoso dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

c. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan

Untuk sasaran Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan capaian kinerjanya sebesar 78,35 % sedangkan realisasi anggaran yang mendukung :

a. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum
b. Progran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Rata rata dari realisasi 2 progran tersebut sebesar 77,94 % dengan demikian diperoleh tingkat efisiensi sebesar 78,35% - 77,94 % = **0,41%**.

- Penyebab: Anggaran lebih banyak terserap pada belanja rutin (operasional/gaji/BBM patroli) yang sifatnya konsumtif, namun tidak menyentuh akar masalah (tindakan preventif). Ini menjadi catatan penting untuk RPJMD 2025-2029.

2. Analisis Capaian Berdasarkan RPJMD 2025-2029 (Baseline)

a. Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan

Dari Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 98,94% dan realisasi anggaran dari tiga Program yang mendukung yaitu

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik
c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Rata rata dari tiga Program tersebut sebesar 43,28 % sehingga dapat diperoleh efisiensi dengan formula capaian dikurangi dengan realisasi = 98,94 % – 43,28 % = 55,66 %.

Hal ini menunjukkan komitmen di Kecamatan Rejoso dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun efesiensi ini disebabkan :

Dengan keterbatasan jumlah Pegawai Pemerintah Kecamatan Rejoso tetap melaksanakan Pelayanan publik secara maksimal. Sehingga Masyarakat mendapatkan pelayanan lebih baik lagi;

b. Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.

Untuk sasaran Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan capaian kinerjanya sebesar 354 % sedangdan realisasi anggaran yang mendukung

a. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum
b. Progran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Rata rata dari realisasi 2 progran tersebut sebesar 36,62 % dengan demikian diperoleh tingkat efisiensi sebesar 354 % - 36,62 % = 317,38% menunjukkan masih adanya kurangnya komitmen dari Kecamatan Rejoso, dalam melaksakan kinerja.

- Penyebab: Anggaran lebih banyak terserap pada belanja rutin (operasional/honor/koordinasi/konsultasi/BBM patroli) yang sifatnya konsumtif, namun tidak menyentuh akar masalah

(tindakan preventif). Ini menjadi catatan penting untuk RPJMD 2025-2029.

c. Presentase Desa Tertib Administrasi Desa

Untuk sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Desa capaian kinerjanya sebesar 97% sedangkan realisasi anggaran yang mendukung Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar 34,46 %. dengan demikian diperoleh tingkat efisiensi sebesar 97 % - 34,46% = **62,54 %** menunjukkan adanya optimalisasi teknologi informasi (digitalisasi) dan tingginya partisipasi swadaya perangkat desa, sehingga ketergantungan pada belanja modal/operasional dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas output.

A.7. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Tabel : 3.1.7
Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja.
(Berdasarkan Renstra 2024-2026)

No.	Sasaran Stategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Kinerja Tahun 2025		
						Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	**Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**	**Renstra 2024-2026**		--	**78**	**71,02**	**91,05%**
	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)**	**Renstra 2024-2026**	-	-	**92**	**90,58**	**98,45%**
1.				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Kecamatan***	**80**	**67,7**	**84%**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	9 Dokumen	7	77,7%
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah	6 Dokumen	6	100%

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtIsar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtIsar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtIsar Realisasi Kinerja SKPD	4 lap	4	100%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13 Dokumen	9	69,2%
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang MenerIma Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang	14	87,5%
				Koordinasi dan Pelaksanaan AkuntansI SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan AkuntansI SKPD	12 Dokumen	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan AkhIr Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan AkhIr Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan AkhIr Tahun SKPD	1 Laporan	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	12 Laporan	-	-
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Dokumen	-	-
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16 Dokumen	14	87,5%
				Pengadaan Pakaian DInas beserta AtrIbut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian DInas beserta AtrIbut Kelengkapan	2 paket	-	-
				Pendidikan dan PelatIhan PegawaI Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PegawaI Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang MengIkutI Pendidikan dan PelatIhan	19 orang	8	42%

				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 dokumen	3	35,91%
				Penyediaan Komponen InstalasI LIstrIk/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasI LIstrIk/Penerangan Bangunan Kantor yang DIsediakan	4 paket	1	25%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang DIsediakan	8 paket	2	25$
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang DIsediakan	12 paket	4	33,3%
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen	-	-
				FasilitasI Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan FasilitasI Kunjungan Tamu	1 Dokumen	1	100%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasI SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasI SKPD	10 laporan	8	84,62%
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25 dok	24	98,28
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerIntah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan	9 unit	-	-
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 unit	-	-
				Pengadaan Peralatan dan MesIn Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan MesIn Lainnya yang DIsediakan	10 unit	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 lap	12	100%
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12	100%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya AIr dan LIstrIk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya AIr dan LIstrIk yang Disediakan	7 laporan	7	100%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpellhara	22 unit	20	90%

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan DInas atau Kendaraan DInas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan DInas atau Kendaraan DInas Jabatan yang DIpelIhara dan dibayarkan Pajaknya	2	2	100%
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang DipelIhara	8 unit	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan MesIn Lainnya	Jumlah Peralatan dan MesIn Lainnya yang DipelIhara	10 unit	7	25,95%
				Pemeliharaan/RehabIlItasI Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang DIpelIhara/DirehabIlItasI	2 unit	-	-
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan denga tertIb	100%	100	100%
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 laporan	1	100%
				Koordinasi/SInergI Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan InstansI VertIkal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/SInergI Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan InstansI VertIkal Terkait	2 laporan	2	100%
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 laporan	1	100%
				Koordinasi/SInergI dengan Perangkat Daerah dan/atau InstansI VertIkal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/SInergI dengan Perangkat Daerah dan/atau InstansI VertIkal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 dok	1	100%
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang DIlImpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang DIlImpahkan kepada Camat	4 laporan	4	92,54%

				Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilImpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang DilImpahkan	4 laporan	4	92,54%
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif berpartisipasi dalam Pembangunan di desa	90%	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktIf dalam proses pembangunan di Kecamatan	120	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa	120 lembaga	-	-
				SInkronIsasI Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh PemerIntah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah dokumen sInkronIsasI program kerja dan Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerIntah dan swasta di wIl kecamatan	7 dok	7	100%
	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	**Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan**	**Renstra 2024-2026**			85%	18,18%	21,3%
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang ditanganI	75%	50%	66,6%%
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 laporan	6	45,8%
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara NasIonal Indonesia dan InstansI	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara NasIonal Indonesia dan InstansI VertIkal di wilayah kecamatan	12 laporan	12	100%

				VertIkal di Wilayah Kecamatan				
				HarmonIsasI Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan HarmonIsasI Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6 laporan	6	100%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase warga/lembaga yang mengIkutI pembinaan wawasan kebangsan	97%	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah warga/lembaga yang mengIkutI pembinaan wawasan kebangsaan	120 lembaga	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan NasIonal dalam rangka Memantapkan Pengamalan PancasIla, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PelestarIan BhInneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang MengIkutI Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan NasIonal dalam rangka Memantapkan Pengamalan PancasIla, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PelestarIan BhInneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	700 orang	-	-
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa Cepat Berkembang	80%	-	-
				FasilitasI, RekomendasI dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Cepat Berkembang	-	-	-
				FasilitasI Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang TerfasilitasI	24 dok	-	-

Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja.
(Berdasarkan Renstra 2025-2029)

No.	Sasaran Stategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Kinerja Tahun 2025		
						Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Renstra 2025-2029	-	-	91,54	90,57	98,94%
.				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Nilai SAKIP Kecamatan*	61	67,7	110%
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	2	100%
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2 Laporan	2	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	3	75%
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	1	100,00%
				Koordinasi Dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	1	100,00%
				Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD	1 Dokumen	1	100,00%
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3 dokumen	3	100,00%

				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29 dokumen	29	98%
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14 orang	14	100%
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	1	100 %
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1	100,00%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	13 Laporan	13	100%
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15 Dokumen	15	100%
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana KebutuhanBarang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1	100,00%
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	14	100%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen	2	100%
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	-	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	8	40%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah DokumenAdministrasi UmumPerangkat Daerah	15 Dokumen	15	100$
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2	38,66%

				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11	100,00%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	11	100,00%
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	11	100,00%
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen	-	-
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu	1 Laporan	1	100,00%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3	96,54%
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2	98,28
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan	6 Unit	4	66,6%
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	4	66,6%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	48 Laporan	38	79%%
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat	12 Laporan	12	100%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2	100%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	18 Unit	17	95%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3	100%

				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihar	5 Unit	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	5	90%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2	100%
2.	Meningkatkan Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Renstra 2025-2029	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	80%	80	100%
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Cama	4 laporan	4	92,54%
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4	92,54%
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	2 dokumen	2	83,79%
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/SInergI dengan Perangkat Daerah dan/atau InstansI VertIkal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 dokumen	2	83,79%
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamata	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamata	3 laporan	3	100% ;
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	3 laporan	3	100%
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1 dokumen	-	-
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Renstra 2025-2029	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	80 %	80	100%
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses	120 lembaga	120	100%

					pembangunan di Kecamatan			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 lembaga	6	100%
				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 dokumen	1	100%
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Renstra 2025-2029	-	-	18,8	66,6%	354%
4.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Renstra 2025-2029	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangan	80%	80%	100%
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	4	98,59%
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	4 Laporan	4	98,59%
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 laporan	1	100%
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara NasIonal Indonesia dan InstansI VertIkal di wilayah kecamatan	1 laporan	1	100%

5.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Renstra 2025-2029	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	80%	80%	100%
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	120 lembaga	120	100%
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, PelaksanaanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	700 Orang	700	100%
	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	Renstra 2025-2029	-	-	90%	87,5%	97 %
6.	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	Renstra 2025-2029	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	ProsentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang	85%	60%	70,5%
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	24 desa	24	100%
				Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa yang TerfasilitasI	5 Dokumen	5	100%
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	5 Dokumen	5	100%
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	5 Dokumen	5	100%

Berdasarkan Renstra 2024-2026

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui dan dijelaskan hal-hal terkait Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Rejoso sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , terkait dengan Nilai SAKIP Kecamatan dari target Nilai 80 tercapai Nilai 67,7 Dengan ini menunjukan capaian kinerja sebesar 84%

   Adapun kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari target 9 Dokumen realisasi sebanyak 7 Dokumen hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 77,7%
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari target 13 Dokumen realisasi sebanyak 9 Dokumen hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 69,2%
   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dari target 12 Dokumen belum ada realisasi sehingga capaian kinerja belum terpenuhi
   d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat dari target 16 Dokumen terealisasi sebesar 14 Dokumen hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 87,5%
   e. Administrasi Umum Perangkat Daerah dari target 7 Dokumen realisasi sebanyak 3 Dokumen hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 35,91%
   f. Pengadaan Barang Milik Daerah dari target 9 Unit namun belum ada realisasi sehingga capaian kinerja belum terpenuhi
   g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari target 12 Laporan realisasi sebesar 12 Laporan hal ini menunjukan capaian kenerja sebesar 100%
   h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Daerah dari target 22 Unit realisasi sebesar 20 Unit hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 90%

   Walaupun capaian indikator program mencapai 84% (kategori baik), namun secara substantif masih terdapat kelemahan pada kegiatan strategis penunjang tata kelola.

Ketidakseimbangan antara capaian administratif operasional dan capaian manajemen kinerja menjadi faktor utama belum tercapainya target Nilai SAKIP 80.

Jika dilakukan penguatan pada aspek perencanaan, evaluasi, dan administrasi kepegawaian, maka target nilai SAKIP berpotensi tercapai bahkan meningkat pada tahun berikutnya.

2. Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik dari target 100,00% realisasinya 100% sehingga capaian kinerjanya 100%.

Adapun kegiatan dari Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik capaiannya Adalah sebagai berikut :

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dari target 1 Laporan realisasi 1 laporan hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 100%
b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dari target 1 Laporan realisasi 1 laporan hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 100%
c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dari target 4 Laporan realisasi 4 laporan 92,54%

Analisis Kinerja Secara Keseluruhan secara umum, Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik berjalan cukup baik**,** namun belum optimal

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dari target 90 % belum ada realisasi sehingga juga menunjukan belum adanya capaian kinerja

   Adapun kegiatanya dari Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu :

   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dari target 120 Lembaga dalam RPD 2024-2026 belum ada realisasi sehingga

      Hal ini menunjukan kegiatan ini target belum tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dari target 75% realisasinya 50% sehingga capaian kinerjanya 66,6%

Adapun Kegiatan dari Program Koordinasi Ketentranman dan Ketertiban Umum yaitu,

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dari target 12 Laporan realisasi sebanyak 6 Laporan hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 45,8%

5. Progran Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Rejoso dari target 97% namun tidak ada realisasi karen pada RPD 2024-2026 belum dilakukan kegiatan tersebut
   a. Adapaun Kegiatan dari Progran Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dari tanget 120 Lembaga/Organisasi
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa dari target 80% belum ada realisasi sehingga belum ada capaian sesuai target

   Adapaun kegiatan dari Program Pembinaan dan Pengawasan Desa yaitu
   a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dari target 24 Desa/Kelurahan

   Program Pembinaan dan Pengawasan Desa belum mencapai target (80%), Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kegiatan belum optimal. Diperlukan evaluasi pada indikator, mekanisme pengukuran, serta penguatan kualitas hasil pembinaan dan pengawasan desa.

Berdasarkan Renstra 2025-2029

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui dan dijelaskan hal-hal terkait Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Rejoso sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , terkait dengan Nilai SAKIP Kecamatan dari target Nilai 61 tercapai Nilai 67,7 dengan ini menunjukan capaian kinerja sebesar 110%

   Adapun kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari target 2 Dokumen realisasi sebanyak 2 Dokumen hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 100%

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari target 29 dokumen realisasi sebanyak 29 Dokumen hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 98%
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dari target 15 Dokumen realisasi sebanyak 15 Dokumen hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 100%
d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat dari target 2 dokumen realisasi sebesar 2 Dokumen hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 100%
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah dari target 15 Dokumen realisasi sebanyak 15 Dokumen hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 100%
f. Pengadaan Barang Milik Daerah dari target 6 Unit realisasi sebanyak 4 Unit, hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 66,6%
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari target 48 Laporan realisasi sebesar 38 Laporan hal ini menunjukan capaian kenerja sebesar 79 %
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari target 18 Unit realisasi sebesar 17 Unit hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 95%.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dari target 80% realisasinya 80% sehingga capaian kinerjanya 100%.

Adapun kegiatan dari Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik capaiannya Adalah sebagai berikut :

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dari target 3 Laporan realisasi 3 laporan hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 100%
b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dari target 2 dokumen realisasi 2 dokumen hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 83,79%
c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dari target 4 Laporan realisasi 4 laporan 92,54%

Analisis Kinerja Secara Keseluruhan

Secara keseluruhan maka dapat disimpulkan bahwa Program berjalan efektif**,** Perencanaan dan pelaksanaan selaras, Tidak terdapat hambatan signifikan, Koordinasi internal dan eksternal berjalan baik

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dari target 80 % realisasinya 80% sehingga capaian kinerjanya 100%.

   Hal ini menunjukan kegiatan ini sudah mencapai target sesuai dengan yang telah ditentukan.

   Adapun kegiatannya dari Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu :

   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dari target 120 Lembaga tercapai 120 Lembaga sehingga capaian kinerjanya 100%

      Hal ini menunjukan kegiatan ini telah tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan

   Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan secara umum, perlu perhatian khusus terhadap peningkatan kualitas dan jangkauan kegiatan pemberdayaan desa agar manfaat program lebih merata dan berkelanjutan.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dari target 80% realisasinya 80% sehingga capaian kinerjanya 100%

   Adapun Kegiatan dari Program Koordinasi Ketentranman dan Ketertiban Umum yaitu,

   a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dari target 1 Laporan realisasi sebanyak 1 Laporan hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 100%
   b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dari target 4 Laporan realisasi sebanyak 4 Laporan hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 98,59%

   Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum berhasil dilaksanakan secara optima**l** dengan tingkat capaian kinerja 100%, yang menunjukkan bahwa:

   - Seluruh target kegiatan tercapai sesuai rencana.
   - Program berjalan efektif tanpa kekurangan capaian.
   - Koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan terlaksana dengan baik.
   - Tidak terdapat kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan.

5. Progran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Rejoso pada tahun 2025 dari target 80 % realisasi 80% , hal ini menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%

   Adapun Kegiatan dari Progran Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dari tanget 120 Lembaga/Organisasi Masyarakat terealisasi 120 Lembaga menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa dari target 85% realisasi sebesar 60% hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 70,5%

   Adapaun kegiatan dari Program Pembinaan dan Pengawasan Desa yaitu

   a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dari target 24 Desa/Kelurahan terealisasi 24 Desa/Kelurahan, hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 100%

   Capaian kinerja sebesar 100% menunjukkan bahwa Program Pembinaan dan Pengawasan Desa belum terlaksana secara signifikan dan optimal, sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan perlu adanya efektivitas koordinasi, serta komitmen perangkat kecamatan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.



B. Realisasi Anggaran

Pengukuran kinerja kegiatan akuntabilitas juga dapat dilihat dari realisasi anggaran pada tahun 2025, yang merupakan bagian dari laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Realisasi anggaran Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk 2025 secara umum diuraikan sebagai berikut

Tabel 3.2

Realisasi Anggaran Tahun2025

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.996.834.471**	**2.283.871.553**	**712.962.918**	**76 21%**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**61.058.900**	**32.876.000**	**28.182.900**	**53,84%**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.100.000	10.526.000	7.574.000	58,15%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.958.900	22.350.000	20.608.900	52,03%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2.516.758.000**	**1.971.949.362**	**544.808.638**	**78,35%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.454.172.000	1.962.993.362	491.178.638	79,99%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0	0	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	32.436.000	2.236.000	30.200.000	6,89%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	30.150.000	6.720.000	23.430.000	22,29%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**0**	**0**	**0**	**0%**
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0	0%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**28.850.000**	**18.100.000**	**10.750.000**	**62,74%**
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	28.850.000	18.100.000	10.750.000	62,74%

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**159.741.230**	**86.241.201**	**73.500.029**	**53.99%**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.795.930	8.940.500	3.855.430	69,87%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.820.300	32.028.858	32.791.442	49,41%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.210.000	1.465.000	7.745.000	15,91%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	0	6.000.000	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.445.000	8.055.400	389.600	95,39%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.575.000	27.187.943	20.387.057	57,15%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.895.000	8.563.500	2.331.500	78,60%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**48.000.000**	**46.953.000**	**1.047.000**	**97,82%**
	Pengadaan Mebel	0	0	0	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.000.000	46.953.000	1.047.000	97,82%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**87.502.000**	**54.746.330**	**32.755.670**	**62,57%**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43.752.000	35.106.542	8.645.458	80,24%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.750.000	19.639.788	24.110.212	44,89%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**94.924.341**	**73.005.660**	**21.918.681**	**76,91%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.847.250	34.579.118	7.268.132	82,63%
	Pemeliharaan Mebel	2.500.000	2.500.000	0	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.170.000	6.969.000	1.201.000	85,30%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.407.091	28.957.542	13.449.549	68,28%
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**81.978.900**	**75.455.000**	**6.523.900**	**92,04%**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**54.133.000**	**49.622.000**	**4.511.000**	**91,67%**

	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	54.133.000	49.622.000	4.511.000	91,67%
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**12.388.400**	**12.030.000**	**358.400**	**97,11%**
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12.388.400	12.030.000	358.400	97,11%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**15.457.500**	**13.803.000**	**1.654.500**	**89,30%**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	15.457.500	13.803.000	1.654.500	89,30%
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**195.087.300**	**164.950.800**	**30.136.500**	**84,55%**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**195.087.300**	**164.950.800**	**30.136.500**	**84,55%**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	33.738.400	19.171.000	14.567.400	56,82%
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	161.348.900	145.779.800	15.569.100	90,35%
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**58.630.000**	**51.850.000**	**6.780.000**	**88,44%**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**58.630.000**	**51.850.000**	**6.780.000**	**88,44%**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	45.430.000	39.457.000	5.973.000	86,85%
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	13.200.000	12.393.000	807. 000	93,89%

5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**180.213.900**	**142.996.000**	**37.217.900**	**79,35%**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	180.213.900	142.996.000	37.217.900	79,35%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	180.213.900	142.996.000	37.217.900	79,35%
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**96.798.200**	**84.207.500**	**12.590.700**	**86,99%**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**96.798.200**	**84.207.500**	**12.590.700**	**86,99%**
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	60.623.200	49.407.500	11.215.700	81,50%
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	36.175.000	34.800.000	1.375.000	96,20%

Dari Tabel 3.2 diatas dapat kami sampaikan Realisasi Anggaran Program dan/atau Kegiatan Kecamatan Rejoso Tahun 2025 sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.2.996.834.471, Realisasi Anggaran sebesar Rp.2.283.871.553, Sisa Anggaran sebesar Rp.712.962.918, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 76 21%, dengan rincian Realisasi Anggaran Kegiatan dan Subkegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.61.058.900, Realisasi Anggaran sebesar Rp.32.876.000, Sisa Anggaran sebesar Rp.28.182.900, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 53,84%.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 18.100.000,-, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 10.526.000, Sisa Anggaran sebesar Rp. 7.574.000, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 58,15%

Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 42.958.900, Realisasi Anggaran sebesar Rp 22.350.000, Sisa Anggaran sebesar Rp. 20.608.900, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 52,03%.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.516.758.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 1.971.949.362, Sisa Anggaran sebesar Rp. 544.808.638, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 78,35%.

Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.454.172.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 1.962.993.362, Sisa Anggaran sebesar Rp. 491.178.638, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 79,99%

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pagu Anggaran sebesar Rp.0, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 0, Sisa Anggaran sebesar Rp.0,Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 0 %

Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 32.436.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp 2.236.000, Sisa Anggaran sebesar 30.200.000, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 6,89%.

Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 30.150.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 6.720.000, Sisa Anggaran sebesar Rp 23.430.000, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 22,29%.

Administrasi Barang Miliki Daerah pada Perangkat Daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 0, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 0, Sisa Anggaran sebesar Rp. 0,- Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 0 %

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 0, Realisasi Anggaran sebesar Rp.0, Sisa Anggaran sebesar Rp.0, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 0 %

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 28.850.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 18.100.000, Sisa Anggaran sebesar Rp. 10.750.000, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 62,74%.

Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 28.850.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 18.100.000, Sisa Anggaran sebesar Rp. 10.750.000, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 62,74%.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 159.741.230. Realisasi Anggaran sebesar Rp. 86.241.201, Sisa Anggaran sebesar Rp. 73.500.029, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 53.99%.

Subkegiatan penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 12.795.930, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 8.940.500, Sisa Anggaran sebesar Rp. 3.855.430, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 69,87%.

Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 64.820.300, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 32.028.858, Sisa Anggaran sebesar Rp. 32.791.442, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 49,41%.

Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan Pagu Anggaran sebesarRp. 9.210.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 1.465.000, Sisa Anggaran sebesar Rp. 7.745.000, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 15,91%.

Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 6.000.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp.0, Sisa Anggaran sebesar Rp. 6.000.000, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 0%.

Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 8.445.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 8.055.400, Sisa Anggaran sebesar Rp. 389.600, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 95,39%.

Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 47.575.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 27.187.943, Sisa Anggaran sebesar Rp. 20.387.057, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 57,15%.

Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 10.895.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 8.563.500, Sisa Anggaran sebesar Rp. 2.331.500, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 78,60%.

Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 48.000.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 46.953.000, Sisa Anggaran sebesar Rp. 1.047.000, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 97,82%.

SubKegiatan pengadaan mebel dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 0 Realisasi Anggaran sebesar Rp 0 Sisa Anggaran sebesar Rp 0 Persentase Penyerapan Anggaran sebesar -

SubKegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 48.000.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 46.953.000, Sisa Anggaran sebesar Rp. 1.047.000 Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 97,82%.

Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 87.502.000 Realisasi Anggaran sebesar Rp. 54.746.330,Sisa Anggaran sebesar Rp. 32.755.670, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 62,57%.

SubKegiatan Penyediaan jasa surat menyurat dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 43.752.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 35.106.542. Sisa Anggaran sebesar Rp. 8.645.458, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 80,24%.

SubKegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 43.750.000. Realisasi Anggaran sebesar Rp. 19.639.788, Sisa Anggaran sebesar Rp. 24.110.212, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 44,89 %.

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 94.924.341, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 73.005.660 Sisa Anggaran sebesar Rp. 21.918.681, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 76,91%.

SubKegiatan penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan pererangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 41.847.250, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 34.579.118, Sisa Anggaran sebesar Rp. 7.268.132, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 82,63%.

SubKegiatan pemeliharaan mebel dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 2.500.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 2.500.000, Sisa Anggaran sebesar Rp. 0 Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 100 %.

SubKegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 8.170.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 6.969.000, Sisa Anggaran sebesar Rp. 1.201.000, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 85,30%.

SubKegiatan pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainya dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 42.407.091, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 28.957.542, Sisa Anggaran sebesar Rp. 13.449.549, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 68,28 %.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 81.978.900, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 75.455.000, Sisa Anggaran sebesar Rp. 6.523.900, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar

92,04%, dengan rincian Realisasi Anggaran Kegiatan dan Subkegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 54.133.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 49.622.000, Sisa Anggaran sebesar Rp. 4.511.000, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 91,67 %.

Subkegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 54.133.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 49.622.000 Sisa Anggaran sebesar Rp. 4.511.000 Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 91,67 %

Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 12.388.400, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 12.030.000, Sisa Anggaran sebesar Rp. 358.400, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 97,11%.

Subkegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 12.388.400, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 12.030.000, Sisa Anggaran sebesar Rp. 358.400, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 97,11 %

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 15.457.500, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 13.803.000. Sisa Anggaran sebesar Rp. 1.654.500, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 89,30 %.

Subkegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 15.457.500, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 13.803.000, Sisa Anggaran sebesar Rp. 1.654.500, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 89,30%.



Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 195.087.300, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 164.950.800, Sisa Anggaran sebesar Rp. 30.136.500, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 84,55%.

Kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 195.087.300 Realisasi Anggaran sebesar Rp. 164.950.800, Sisa Anggaran sebesar Rp. 30.136.500, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 84,55 %.

SubKegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 33.738.400, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 19.171.000, Sisa Anggaran sebesar Rp. 14.567.400 Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 56,82 %.

SubKegiatan singkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 161.348.900, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 145.779.800, Sisa Anggaran sebesar Rp. 15.569.100, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 90,35%

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 58.630.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 51.850.000, Sisa Anggaran sebesar Rp. 6.780.000, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 88,44%.

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 58.630.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 51.850.000, Sisa Anggaran sebesar Rp. 6.780.000 Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 88,44%.

SubKegiatan sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertical di wilayah kecamatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 45.430.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 39.457.000, Sisa Anggaran sebesar Rp. 5.973.000, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 86,85 %.

SubKegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 13.200.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 12.393.000, Sisa Anggaran sebesar Rp. 807.000, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 93,89 %.
Program penyelenggaran urusan pemerintahan umum dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 180.213.900, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 142.996.000, Sisa Anggaran sebesar Rp. 37.217.900, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 79,35 %.

Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasaan kepala daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 180.213.900, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 142.996.000, Sisa Anggaran sebesar Rp. 37.217.900 Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 79,35 %.
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Indonesia, dengan Pagu Anggaran sebesar RP. 180.213.900, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 142.996.000 Sisa Anggaran sebesar Rp. 37.217.900 .Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 79,35%

Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 96.798.200, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 84.207.500, Sisa Anggaran sebesar Rp. 12.590.700, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 86,99%.

Kegiatan Fasilitas rekomendasi dan koordinasi pembinaaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 96.798.200. Realisasi Anggaran sebesar Rp. 84.207.500, Sisa Anggaran sebesar Rp. 12.590.700, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 86,99 %.

SubKegiatan Fasilitas adminitrasi tata pemerintahan desa dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 60.623.200, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 49.407.500 - Sisa Anggaran sebesar Rp. 11.215.700, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 81,50 %.

SubKegiatan fasilitasi penyusunan perencanan pembangunan partisipasif dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 36.175.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 34.800.000, Sisa Anggaran sebesar Rp. 1.375.000 Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 96,20 %.

BAB IV
PENUTUP

1.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan tujuan dan sasaran Kecamatan Rejoso dengan mengacu pada Review Renstra Kecamatan Rejoso Tahun 2024-2026 dan Renstra 2025-2029.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Rejoso berpedoman pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Sebagai instansi yang mempunyai tugas umum pemerintahan dalam lingkup Kecamatan telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 sebahaimana tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian (%)
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	*Renstra 2024-2026*	78 indeks	71,02	91,05 %
2.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	*Renstra 2024-2026*	92 indeks	90,58	98,45 %
3.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	*Renstra 2024-2026*	85 %	66,6 %	78,35 %

4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (Indeks)	*Renstra 2025-2029*	91,54	90,57	98,94 %
5	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	*Renstra 2025-2029*	18,8 %	66,6 %	354 %
6	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	*Renstra 2025-2029*	90 %	87,5 %	97 %

1.2. SARAN

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja perlu upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, meningkat menjadi lebih baik dan akuntabel antara lain :

a. Melakukan re-orientasi terhadap program / kegiatan yang kurang tepat sasaran dan sinkronisasi dokumen - dokumen perencanaan dan kinerja;
b. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program / kegiatan;
c. Memberdayakan sumber daya yang ada di kecamatan Rejoso secara menyeluruh,efektif, dan efesien;
d. Menguatkan komitmen dari masing-masing aparatur untuk meningkatkan kinerjanya.
e. Mempertajam kembali dalam penargetan awal dalam renstra, agar tidak terjadi ketimpangan yang sangat jauh dengan realisasi

Kami menyadari penyusunan Laporan Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rejoso Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran maupun masukan, serta kritik yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan demi penyempurnaan laporan kami pada tahun mendatang.

Rejoso, 20 April 2026
CAMAT REJOSO

TEGUH OVI ANDRIYANTO, SIP
Pembina Tingkat I
NIP. 19730906 199303 1 006

LIST BUKTI DUKUNG LKJIP TAHUN 2025
KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK
RENSTRA 2024-2026

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
   a. https://drive.google.com/file/d/1WmE59dzF2cznU1yGocA9TWw6uERd2_EI/view?usp=drive_link
   b. https://drive.google.com/file/d/11xKNpoYOm02MT-l8zEVZCRbXNaDhUFmT/view?usp=drive_link
7. Indikator Kinerja Utama
   https://drive.google.com/file/d/14S0AmEi42ssklzpgyeaakm3CtMtXnX5o/view
8. Dokumen Penganggran /DPA/DPPA Tahun 2025
   1. https://drive.google.com/file/d/1rmSeTBY6M5gQCmLc5p70N14wRI2slAdu/view?usp=drive_link
   2. https://drive.google.com/file/d/1Y1EPr-LPnMyDeYjiObRFuq8yTWgJOeuW/view?usp=drive_link

9. Dokumen Bukti dukung Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan Capaian Renstra 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian	List Bukti Dukung
1	2	3		4	5	6	
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Renstra 2024-2026	78	71,02	91,05%	https://drive.google.com/file/d/1_QQDbN2f3ehk3t7Ic9pye-Qk3ue-5wnn/view?usp=drive_link
2.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	92	90,58	98,45%	https://drive.google.com/drive/folders/12A51vA1xgPLi4Jzlss21yyYwhfkY0pmq?usp=drive_link
3.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	85%	18,18%	21,3%	https://drive.google.com/drive/folders/1sc2U1n0DpP9W4hpfKsfxueVd_VaZVkh2?usp=drive_link
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Nilai SAKIP Kecamatan*	Renstra 2024-2026	80	67,7	84%	https://drive.google.com/drive/folders/1Tge1Gl7hiU12KLnr0A3CI75iDry1jN94?usp=drive_link

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Renstra 2024-2026	9 Dokumen	7	77,7%	https://drive.google.com/drive/folders/1ukSyTHHKqzKkkB275-aGXIUk5bL5M_76?usp=drive_link
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah DokumenAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah	Renstra 2024-2026	13 Dokumen	9	69,2%	https://drive.google.com/drive/folders/1JhfGEX-6FQSVyCsr_YZfmw3DIloYwqfB?usp=drive_link
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Renstra 2024-2026	12 Dokumen	-	-	https://drive.google.com/drive/folders/1ulqZDGVxZlzTfqIuZCcOBkiUnIEdnRt_?usp=drive_link
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Renstra 2024-2026	26 Dokumen	3	11,5	https://drive.google.com/drive/folders/1w39P45C70Iw0ePR-37K6o2ijMwsx57dh?usp=drive_link
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah DokumenAdministrasi UmumPerangkat Daerah	Renstra 2024-2026	7 Dokumen	3	35,91%	https://drive.google.com/drive/folders/1Kp8ZIjkzKhKoga6D70dE37Z80lSSMNYc?usp=drive_link_
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan	Renstra 2024-2026	9 Unit	-	-	https://drive.google.com/drive/folders/1ulqZDGVxZlzTfqIuZCcOBkiUnIEdnRt_?usp=drive_link
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Renstra 2024-2026	12 Laporan	12	100%	https://drive.google.com/file/d/1fKu5rLzwSmSD_kscJzCF5YW8gXkD-V9i/view?usp=drive_link
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	Renstra 2024-2026	22 Unit	20	90%	https://drive.google.com/drive/folders/1pyVMfrFZIUCyNY92duTaGrMcEiOhT-

	Daerah						fT?usp=drive_link
B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	Renstra 2024-2026	100%	100,00	100,00 %	https://drive.google.com/drive/folders/1j5_J3Krxz2LRBiLL7bp55eEeN5e3NzCC?usp=drive_link
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Renstra 2024-2026	1 Laporan	1	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1j5_J3Krxz2LRBiLL7bp55eEeN5e3NzCC?usp=drive_link
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Renstra 2024-2026	1 Laporan	1	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1j5_J3Krxz2LRBiLL7bp55eEeN5e3NzCC?usp=drive_link
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Cama	Renstra 2024-2026	4 Laporan	4	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1kpcerkLG1-0z_RlMLZgYKqNu70z_i1Nb?usp=drive_link
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	Renstra 2024-2026	90%	90	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1CV2J25ob8af4lFgtttGQFwb3gvkhZklx?usp=drive_link
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	Renstra 2024-2026	120 lembaga	-	-	-
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangan	Renstra 2024-2026	75%	50%	66,6%	https://drive.google.com/drive/folders/1qZYjZKK0ckbkvvaHDXP3_dqktM2gh6Xy?usp=drive_link
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Renstra 2024-2026	12 Laporan	6	45,8%	https://drive.google.com/drive/folders/1qZYjZKK0ckbkvvaHDXP3_dqktM2gh6Xy?usp=drive_link

E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Renstra 2024-2026	97%	-	-	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Renstra 2024-2026	120 Lembaga/OrganisasiMasyarakat	-	-	
F.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	ProsentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang	Renstra 2024-2026	80%	-	-	Belum ada capaian
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	Renstra 2024-2026	-	-	-	Tidak ada Target

LIST BUKTI DUKUNG LKJIP TAHUN 2025
KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK
RENSTRA 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian	List Bukti Dukung
1	2	3		4	5	6	
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Renstra 2025-2029	91,54	90,57	98,94%	https://drive.google.com/drive/folders/12A51vA1xgPLi4Jzlss21yyYwhfkY0pmq?usp=drive_link
3.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Renstra 2025-2029	18,8 %	66,6	354%	https://drive.google.com/file/d/1Ko4HzinqbvEsw4br-SKo5JKeVDblWKxe/view?usp=drive_link
4	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa tertib administrasi desa	Renstra 2025-2029	90	100	111%	https://drive.google.com/drive/folders/1TvfYA_4h8UROLNLQBsvSnhRQhsd8I3-u?usp=drive_link
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)*	Renstra 2025-2029	61	87,5	143%	https://drive.google.com/file/d/19is25j7LjecxZrosyg6eljgDQU_YLNph/view?usp=drive_link4
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Renstra 2025-2029	2 Dokumen	2	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1ukSyTHHKqzKkkB275-aGXIUk5bL5M_76?usp=drive_link
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Renstra 2025-2029	14 Dokumen	14	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1JhfGEX-6FQSVyCsr_YZfmw3DIloYwqfB?usp=drive_link

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Renstra 2025-2029	15 Dokumen	15	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1ulqZDGVxZlzTfqIuZCcOBkiUnIEdnRt_?usp=drive_link
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Renstra 2025-2029	2 Dokumen	2	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1w39P45C70Iw0ePR-37K6o2ijMwsx57dh?usp=drive_link
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Renstra 2025-2029	15 Dokumen	12	80%	https://drive.google.com/drive/folders/1Kp8ZIjkzKhKoga6D70dE37Z80lSSMNYc?usp=drive_link
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan	Renstra 2025-2029	6 Unit	4	66,6%	https://drive.google.com/drive/folders/1ulqZDGVxZlzTfqIuZCcOBkiUnIEdnRt_?usp=drive_link
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Renstra 2025-2029	48 Laporan	38	79%	https://drive.google.com/drive/folders/1Kp8ZIjkzKhKoga6D70dE37Z80lSSMNYc?usp=drive_link
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	Renstra 2025-2029	18 Unit	17	95,24%	https://drive.google.com/drive/folders/1pyVMfrFZIUCyNY92duTaGrMcEiOhT-fT?usp=drive_link
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	Renstra 2025-2029	80%	80	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1j5_J3Krxz2LRBiLL7bp55eEeN5e3NzCC?usp=drive_link

	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Renstra 2025-2029	1 Laporan	1	100,%	https://drive.google.com/drive/folders/1j5_J3Krxz2LRBiLL7bp55eEeN5e3NzCC?usp=drive_link
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Renstra 2025-2029	2 Laporan	2	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1j5_J3Krxz2LRBiLL7bp55eEeN5e3NzCC?usp=drive_link
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Cama	Renstra 2025-2029	4 Laporan	4	92,54%	https://drive.google.com/drive/folders/1j5_J3Krxz2LRBiLL7bp55eEeN5e3NzCC?usp=drive_link
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	Renstra 2025-2029	80%	80	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1CV2J25ob8af4lFgtttGQFwb3gvkhZklx?usp=drive_link
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	Renstra 2025-2029	120 LembagaKemasyarakatan	120	100%	https://drive.google.com/file/d/1xCZlf_NWytHyBZ8AYbFvc39LDmf7cNNS/view?usp=drive_link
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangan	Renstra 2025-2029	80%	80	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1qZYjZKK0ckbkvvaHDXP3_dqktM2gh6Xy?usp=drive_link
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Renstra 2025-2029	1 Laporan	1	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1qZYjZKK0ckbkvvaHDXP3_dqktM2gh6Xy?usp=drive_link
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penerapan dan	Renstra 2025-2029	4 Laporan	4	98,59%	https://drive.google.com/drive/fol

	Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					ders/1ipkD7xGIGyzOQT7GWA8zfKofZK1-jZeA?usp=drive_link
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Renstra 2025-2029	80%	80	100,%	https://drive.google.com/file/d/1VxS4BHoIDlt6Bi1ZiLvLhwZ9xChFWoHe/view?usp=drive_link-
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Renstra 2025-2029	120 Lembaga/OrganisasiMasyarakat	120	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1CV2J25ob8af4lFgtttGQFwb3gvkhZklx?usp=drive_link
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	ProsentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang	Renstra 2025-2029	85%	60	70,5%	https://drive.google.com/drive/folders/1TvfYA_4h8UROLNLQBsvSnhRQhsd8I3-u?usp=drive_link
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	Renstra 2025-2029	24 Desa/Kelurahan	24	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1TvfYA_4h8UROLNLQBsvSnhRQhsd8I3-u?usp=drive_link